

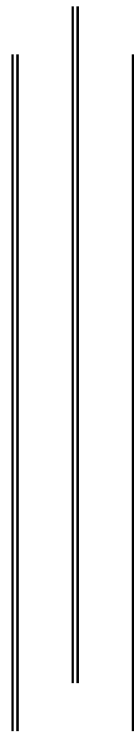


PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

# RENCANA KERJA

( RENJA )

TAHUN 2018



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BLITAR**

Juni, 2017

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan “**RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2017**” dengan baik dan tepat waktu.

RENJA Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 ini disusun berdasarkan RPJMD merupakan plat form tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan yaitu menuju Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera maju dan berdaya saing.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017. Semoga RENJA ini bermanfaat dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penanganan kebencanaan

Blitar, Juni 2016

Kepala BPBD Kabupaten Blitar

**Drs. Heru Irawan, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 198003 1 020

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu .....	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....	6
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN .....	12
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD .....	14
3.3. Program dan Kegiatan .....	14
3.4. Indikator Kinerja.....	17
3.5. Pendanaan.....	18
BAB IV PENUTUP .....	19
Lampiran – lampiran.....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik

Dasar penyusunan RENJA SKPD adalah Permen Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ). Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang penyusunannya dilaksanakan oleh unsur penyelenggaran pemerintahan dengan melibatkan unsur masyarakat.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan, yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, yang menghasilkan 5 (lima) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) untuk periode 20 tahunan
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk periode 5 tahunan
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD atau Rencana Stratejik ( RENSTRA – SKPD ) untuk periode 5 tahun
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) untuk periode 1 tahun

5. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD atau Rencana Kerja ( RENJA – SKPD ) untuk periode 1 tahun.

Pengertian RPJMD menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 14.2 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang berisikan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, yang ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Sedangkan pengertian RENJA SKPD dibuat berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih, yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya RENJA SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Dalam RENJA SKPD tercantum perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun anggaran dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dan keuangan tahun anggaran yang sebelumnya. RENJA SKPD disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar menyusun RENJA SKPD Tahun 2017.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan RENJA SKPD adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya RENJA SKPD Tahun 2017 ini adalah sebagai salah satu syarat pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk Tahun Anggaran 2017. Selain itu juga RENJA SKPD merupakan uraian dari RENSTRA SKPD yang telah ditetapkan pada RPJMD periode tertentu. Sehingga dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat terarah dan terukur dengan jelas karena setiap tahun telah ada prioritas program dan kegiatan guna mendukung tercapainya target tersebut.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA SKPD Tahun 2017 adalah sebagai acuan / dasar dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) Tahun 2017 yang nantinya setelah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) akan dapat dijadikan sebagai alat pengukuran kinerja pada suatu SKPD. Hasil dari pelaksanaan DPA tersebut merupakan salah satu alat ukur keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam RPJMD, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat terarah dan terukur.

### **1.4 SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan RENJA SKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RPJMD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

Lampiran – lampiran

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Capaian RENJA Tahun Lalu

Untuk mengetahui hasil capaian RENJA Tahun lalu dalam hal ini RENJA Tahun 2015, maka perlu kita lihat RENJA Tahun 2015 dan membandingkannya dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015 yang ditetapkan. Program kegiatan yang ditetapkan pada DPA Tahun 2015 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan pelatihan formal
- d. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Kegiatan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  - Pengenalan potensi bencana bagi anak sekolah di wilayah potensi bencana
  - Kajian pengurangan resiko bencana kekeringan Kec. Panggungrejo dan Wonotirto
  - Penyusunan dokumen rencana kontijensi banjir Sutojayan
  - Sosialisasi pengurangan resiko bencana
  - Pembangunan sarana pengurangan resiko bencana
  - Pemasangan rambu-rambu peringatan ancaman longsor



- f. Program kedaruratan dan logistik
  - Pengadaan logistik
  - Operasional kedaruratan
  - Bantuan material penanganan darurat bencana
- g. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana
  - Rehabilitasi sarana prasarana pasca bencana
  - Dana bantuan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
  - DED Sungai bawah tanah KARST di Kec. Panggungrejo dan Kec. Wonoturto
- h. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Publikasi informasi kebencanaan

Dari sisi anggaran pada Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar tahun 2015 menganggarkan biaya program dan kegiatan sebesar Rp. 8.049.875.000 ( Delapan Milyard Empat puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan APBD tahun 2015 merealisasikan sebesar Rp. 7.368.597.710,- (Tujuh Milyard Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah ).

## **2.2 Analisis Kinerja SKPD**

Pelaksanaan DPA SKPD merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya kinerja SKPD. Analisa kinerja SKPD untuk Tahun 2015 secara keseluruhan dapat dikatakan sudah mencapai target. Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program dapat diketahui bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2015 secara umum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya seluruh kegiatan dan tercapainya target indikator kinerja yang ditetapkan sehingga seluruh program dapat terselesaikan khususnya program kebencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar mempunyai instansi induk pada BNPB sehingga dalam menentukan capaian target bidang Kebencanaan sangat dipengaruhi oleh penetapan target dari BNPB baik propinsi maupun nasional. Sehingga kinerja untuk kebencanaan dapat dihitung secara jelas dan apabila ada kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diatasi.

Selain itu, karena adanya keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta keterbatasan personil juga sangat mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keterbatasan anggaran ini akan berdampak pada belanja yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan, sedangkan keterbatasan sarana dan prasarana juga akan menghambat pelaksanaan kegiatan khususnya pada kegiatan kebencanaan dimana sarana dan prasarana yang ada masih sangat minim, sehingga kegiatan belum berjalan optimal.

Hal itu perlu diungkapkan karena sangat mempengaruhi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun masa jabatan Bupati terpilih tersebut.

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
  - Capaian jumlah PUS sebesar 228.828 PUS
  - Capaian jumlah peserta KB Aktif 171.437 peserta
  - Capaian jumlah peserta KB Baru 29.074 peserta
  - Capaian jumlah peserta KB Pria 1.029 peserta
  - Capaian prevalensi peserta KB 74,99 %
  - Capaian jumlah peserta KB MKJP 54.947 peserta
  - Capaian jumlah Drop Out 28.698 peserta
  - Capaian jumlah unmetneed 10,98 %

- Capaian jumlah tempat pelayanan KB 418 tempat
- Capaian jumlah kelompok KB 7.151 kelompok
- Capaian jumlah perkawinan wanita < 20 th 1.240 kejadian
- Capaian jumlah perkawinan wanita > 20 th 10.769 kejadian
- Capaian jumlah PIK KRR aktif 72 kelompok
- Capaian jumlah penyuluhan KRR di SLTA 22 kali
- Capaian kegiatan KIE dan Advokasi KB 570 kali
- Capaian jumlah sarana KIE KB dan KIE KRR 40 unit

## 2. Meningkatkan kualitas hidup keluarga

- Capaian jumlah kelompok BKB Aktif 555 kelompok
- Capaian jumlah kader BKB 2.708 kader
- Capaian jumlah kegiatan BKB 6.339 kali
- Capaian jumlah kelompok BKR Aktif 242 kelompok
- Capaian jumlah keluarga aktif kegiatan BKB 44.875 keluarga
- Capaian jumlah keluarga aktif kegiatan BKR 23.448 keluarga
- Capaian jumlah keluarga Pra S dan KS 1 yang aktif usaha ekonomi 3.864 keluarga
- Capaian jumlah kelompok BKL 276 kelompok
- Capaian jumlah kegiatan BKL 3.050 kali
- Capaian jumlah kelompok UPPKS 349 kelompok

## 3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

- Capaian partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah 9,27%
- Capaian partisipasi perempuan di Lembaga Swasta 90,27%
- Capaian partisipasi angkatan kerja perempuan 288.277
- Capaian Rasio KDRT 18 %
- Capaian jumlah kasus trafficking 0 kasus
- Capaian penyelesaian pengaduan kekerasan 100 %

- Capaian penyelesaian kasus yang ditangani 72 %
  - Capaian efektifitas KPPA 80%
  - Capaian jumlah kegiatan lembaga PP dan PA 6 kegiatan
  - Capaian jumlah vocal point gender 2 SKPD
  - Capaian fasilitasi kasus KDRT 65 kasus
  - Capaian jumlah lembaga gender 13 lembaga
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Pelayanan administrasi perkantoran 100%
  - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%
  - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%
  - Pengembangan sistem capaian kinerja 100%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, maka tugas dan fungsi Badan PPKB adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas**

Badan PPKB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

#### **b. Fungsi**

Badan PPKB mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk Tahun 2014 adalah :

- Masih tingginya keluarga Pra Sejahtera
- Masih tingginya angka kelahiran ( TFR )
- Masih tingginya Unmeet Need ( tidak ber-KB )
- Masih rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang ( MKJP )
- Masih rendahnya kesertaan pria dalam ber KB
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
- Masih rendahnya keaktifan keluarga dalam kegiatan kelompok Tribina
- Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
- Masih belum sinergi antara kebijakan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk
- Masih terdapatnya kebijakan pembangunan yang kurang mendukung kuantitas penduduk
- Terbatasnya sumberdaya aparatur khususnya Penyuluh Keluarga Berencana
- Terbatasnya tenaga pengolah data kependudukan, keluarga berencana, perempuan dan anak.

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan RENJA SKPD juga memperhatikan usulan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2015. Beberapa usulan dari masyarakat guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

- Peningkatan komitmen stakeholder dan mitra kerja serta partisipasi masyarakat guna percepatan mencapai tujuan program pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kependudukan
- Kenaikan biaya operasional Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa ( PPKBD )
- Peningkatan fasilitasi korban kekerasan melalui pemberian bantuan sembako kepada korban kekerasan
- Peningkatan kegiatan KPPA dan UPT Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peningkatan kualitas alat kontrasepsi KB

Dari usulan tersebut memang belum semuanya dapat diakomodasi untuk tahun anggaran 2014 dikarenakan adanya keterbatasan dana maupun sumber daya manusia. Akan tetapi tetap akan dijadikan sebagai prioritas untuk tahun 2015 karena hal tersebut merupakan penunjang dari kesuksesan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan nasional bidang kependudukan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan terutama bagi keluarga miskin dan rentan lainnya serta penyediaan alkon subsidi penuh dari pemerintah untuk 6 provinsi ( Aceh, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku dan NTT ), PUS Mupar ( Muda dan Paritas Rendah), daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, serta daerah dengan unmetneed KB tinggi;
- b. Peningkatan promosi dan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) melalui Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi;
- c. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksinya;
- d. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga;
- e. Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif;

- f. Pengoptimalisasian upaya-upaya advikasi, promosi dan KIE Program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan KB berkualitas;
- g. Pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama tingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen Program KB Nasional;
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi Program KB Nasional berbasis teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis.

3.1.2 Kebijakan nasional bidang pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

- a. Penanganan pengaduan dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
- b. Pelayanan kesehatan dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
- c. Rehabilitasi sosial dengan indikator cakupan layanan rehabilitasi sosial dan cakupan layanan bimbingan rohani
- d. Penegakan dan bantuan hukum dengan indikator cakupan penegak hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Pemulangan dan reintegrasi social dengan indikator cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- f. Peningkatan efektifitas Unit Pelayanan Terpadu Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.



### **3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD**

#### 3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan kualitas dan kemandirian perempuan dan anak

#### 3.2.2 Sasaran

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
2. Mengendalikan TFR
3. Meningkatkan akses informasi terhadap kualitas pelayanan KB dan Kespro bagi keluarga
4. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga
5. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan
6. Meningkatkan wawasan perempuan tentang perlindungan anak dan perempuan
7. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **Program yang dicanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

#### **Kabupaten Blitar tahun 2016 meliputi :**

##### 1. Program Pelayanan Kontrasepsi

###### Kegiatan :

- a. Pelayanan KB Medis Kontrasepsi
- b. KB KIT ( Bantuan Keuangan Propinsi )

##### 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

###### Kegiatan :

- a. Revitalisasi Kelompok Generasi Berencana ( Genre )
- b. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

- c. Lomba Duta Genre Berencana
  - d. Bimbingan Teknis Kelompok PIK Remaja
3. Program Keluarga Berencana
- Kegiatan :
- a. Pelayanan KIE
  - b. Monitoring Evaluasi Peserta KB MKEJ dan Sosialisasi Kepada Kelompok KB
  - c. Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga miskin dalam rangka Hari Jadi Kab.Blitar dan Proklamasi Kemerdekaan RI
  - d. Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin dalam rangka BBRGM, Hari Keluarga TNI dan IBI.
  - e. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu ( Papsemear )
  - f. Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin (MUYAN)
  - g. Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
  - h. Peningkatan Pencapaian Program KB( DAK 2016 )
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- a. Pembentukan Forum Anak Menuju Kabupaten Blitar Layak Anak
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Kegiatan :
- a. Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
  - b. Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
  - c. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
- Kegiatan :
- a. Pembinaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

- b. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.
  - c. Kegiatan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
  - d. Peningkatan Peran kader dalam membangun keluarga sejahtera.
  - e. Temu Usaha antara Kelompok UPPKS dengan Usaha Menengah dan Besar.
  - f. Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Sejahtera.
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak
- Kegiatan :
- a. Fasilitasi PUG bagi perempuan dan Anak
8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS
- Kegiatan :
- a. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS dan PMS
9. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri.
- Kegiatan :
- a. Fasilitasi peran kelompok IMP ( Institusi Masyarakat Pedesaan ) peduli KB
  - b. Revitalisasi Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana ( Saka Kencana )
  - c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program KB
  - d. Bimbingan Evaluasi Kelompok Desa Kencana
  - e. Temu Bakti Saka Kencana dan Kader PIK Remaja
10. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Kegiatan :
- a. Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
11. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
- a. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran.
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( DAU )

13. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Capacity Building bagi penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Secara lebih rinci untuk uraian program dan kegiatan tahun 2016 pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Lampiran.

**3.4. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah suatu variable yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan . Dalam rencana kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar tahun 2016, indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Rumus Indikator		TARGET	
				2015	2016
1.	Prevalensi Peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}}$	X 100%		100%
2.	Prosentase Perkawinan di Bawah umur	$\frac{\text{Jumlah perkawinan di bawah umur}}{\text{Jumlah seluruh perkawinan}}$	X 100%		100%
3.	Prosentase SLTA dan SLTP yang telah mendapatkan penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS termasuk PMS	$\frac{\text{Jumlah SLTA/SLTP yang mendapatkan Penyuluhan th n}}{\text{Jumlah SLTA dan SLTP se Kab.Blitar}}$	X 100%		100%
4.	Prosentase keluarga yang tergabung dalam kelompok bina ketahanan keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang tergabung ,BKL,BKR,BKB}}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$	X 100%		X 100%
5.	Prosentase kasus KDRT yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kasus KDRT di fasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh kasus KDRT}}$	X 100%		X 100%
6.	Prosentase anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh layanan advokasi	$\frac{\text{Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh layanan advokasi}}{\text{Jumlah seluruh kasus anak dan perempuan korban tindak kekerasan}}$	X 100%		X 100%

### **3.5 PENDANAAN**

Untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sebagaimana disebutkan pada bab III di atas, diperlukan anggaran sebesar Rp. 5.372.811.431,- ( Lima Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah ) Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Dibanding dengan anggaran tahun berjalan, anggaran Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2016 lebih tinggi 10% dari renja tahun 2015 hal ini disebabkan ada penambahan kegiatan baru.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan RENJA SKPD Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dimaksudkan agar dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran akan semakin terarah, sehingga kinerja yang diharapkan dapat tercapai.

Selain itu, penyusunan RENJA SKPD Tahun 2016 ini juga telah mengacu pada program nasional dan juga mendukung program MDGs salah satunya adalah Pengentasan Kemiskinan dimana melalui program keluarga berencana diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar sehingga upaya untuk menyejahterakan keluarga akan semakin mudah. Peningkatan jumlah keluarga sejahtera dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Blitar, sehingga setiap tahun Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana harus melakukan pendataan keluarga dalam upaya untuk mengetahui sasaran keluarga miskin yang akan diprioritaskan untuk di tingkatkan kualitasnya.

Demikian RENJA SKPD Tahun 2016 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Blitar pada umumnya.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BLITAR**

